

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dari Hukum Penitensier*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Afifudin, M., 2020, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, PT Gramedia, Jakarta.
- Albab, Ulul, 2009, *'A to Z korupsi menumbuhkembangkan spirit anti korupsi'*, Jaring Pena, Surabaya.
- Ali, Chidir, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Ali, Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Alkostar, Artidjo, 2015, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta.
- Amrullah, M. Arief, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Arief, Barda Nawawi, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
- _____, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi 1. cetakan 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, CV Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Depok.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
- Bemmelen, J.M van, 1987, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.
- Budiardjo, Miriam, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Campbell, Henry, 1990, *Black's law dictionary with pronunciation*, sixth edition, west publishing co. St Paul Minn.
- Cangara, Hafied, 2009, *Komunikasi Politik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Carr, Robert K., Merver H. Bernstein, Walter F. Murphy, 1965, *America Democracy in Theory and Practice: Essentials of National, State, and Local Government*, Holt, Rinehart and Winston. Inc, New York.
- Chazawi, Adami, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonsia*, Bayumedia, Malang.

- Dipraja, R. Achmad S. Soema, 1983, *Beberapa Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, CV Armico, Bandung.
- Djuyandi, Yusa, 2018, *Pengantar Ilmu Politik*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Effendi, Sofian dan Tukiran, 2014, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Ahmad Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Friedrich, Carl J., 1957, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Blaisdell Publishing Company, Waltam.
- Hamzah, Andi, 2006, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardoon, Deborah dan Finn Heinrich, 2013, [*Global Corruption Barometer 2013, Transparency International, Secretariat Alt-Moabit, Berlin, Germany.*](#)
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hertik, Hamzah, 2010, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Hiariej, [Eddy O.S.](#), 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Prenada Media, Jakarta.
- Huntington, Samuel P., 1995, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Pustaka Utama, Jakarta.
- Ibrahim, Johny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, Translated by Andreas Wedberg, Russel & Russel, New York.
- _____, 1967, *Pure Theory of Law*, Translation from the second (Revised and Enlarged) German Edition by Max Knight, Berkeley, Los Angeles, University of California Press, London.
- Kholiq, H. M. Abdul, “*Perilaku Politik Transaksional (Menggagas Fenomena Praktek Politik Uang dalam Pemilu)*”, Manarul Quran.
- Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Loqman, Loebby, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2015, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiariej, 2018, *Menjerat Korupsi Partai Politik*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi.
- _____, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Nasution, Adnan Buyung dkk, 1999, *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Neumann, Sigmund, 1963, *Modern Political Parties dalam Comparative Politics: A Reader*, edited oleh Harry Eckstein dan David E. Apter, The Free Phress of Glencoe, London.
- Nurdjana, IGM, *Korupsi dalam Praktek Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Priyatno, [Dwidja](#), 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, [Bandung](#).
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rommelink, Jan, 2014, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Safa'at, Muchamad Ali, 2011, *Pembubaran Partai Politik (Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- _____, 1983, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

- Santoso, 2010, *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*, POLGOV: Research Centre for Politics and Government, Yogyakarta.
- Santoso, Joko, 2012, *Partai Politik Pilar Demokrasi*, Alumni, Bandung.
- Setiyono, H., 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, Dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Malang.
- Sianturi, S. R., 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, GrafitiPress, Jakarta.
- Sjawie, Hasbullah F., 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Dasar-Dasar Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soltau, Roger H., 1961, *An Introduction to Politics*, Longsman, Green & Co, London.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 1988, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang.
- _____, 1990, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Suhelmi, Ahmad, 2000, *Pemikiran Politik Barat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta.
- Susila, M. Endriyo, et al, 2007, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Umam, Ahmad Khoirul, 2014, *Pergulatan Demokrasi dan Politik di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Semarang.
- Widjaja, Gunawan, 2008, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris PT*, ForumSahabat, Jakarta.
- Widjojanto, Bambang, 2016, *Berkelahi Melawan Korupsi Tunaikan Janji, Wakafkan Diri*, Intrans Publishing, Malang.

- Wijayanto, dkk, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [Wiradipradja, E. Saefullah, 2016](#), *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Cetakan Ke-2, Kencana Media, Bandung.
- Wiyono, R., 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1492).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).

C. Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 an. Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 787 K/PID.SUS/2014 an. Terdakwa Indar Atmanto.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 77 PK/PID.SUS/2015 an. Terpidana Indar Atmanto.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 225 PK/PID.SUS/2017 an. Terpidana Patrice Rio Capella.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 an. Terdakwa Idrus Marham.
- Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 14/PID/TPK/2014/PT.DKI an. Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq.
- Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 13/PID/TPK/2016/PT DKI an. Terdakwa Patrice Rio Capella.
- Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 16 /PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI an. Terdakwa Idrus Marham.
- Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI. an. Terdakwa Muchammad Romahurmuziy.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST an. Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst an. Terdakwa Indar Atmanto.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst an. Terdakwa Patrice Rio Capella.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST. an. Terdakwa Idrus Marham.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst an. Terdakwa Muchammad Romahurmuziy.

D. Karya Ilmiah

- Bawaeda, Adi Freddy, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Efriza, *Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik*, Politica Vol. 10 No. 1 Mei 2019.
- Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum Vol 6-1999.

- Huda, Chairul, *Pertanggungjawaban Partai Politik sebagai Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, bahan diskusi yang disampaikan dalam Studium Generale Fakultas Hukum UII Jogjakarta, 11 Juli 2019.
- Loqman, Loeby, *"Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup"*, Makalah disampaikan dalam "Diskusi Masalah-Masalah Prosedural dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan" Kerjasama Sekretaris Kerjasama Relawan Pengadilan Perencanaan dan Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta 19-20 Juni 1989.
- Mulyati, Nani dan Topo Santoso, *Analysis of Criminal Liability of Political Parties in Indonesia*, Indonesia Law Review, Volume 9 Number 2, May - August 2019.
- Purwadi, Ari, *"Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat dan Daerah Era Otonomi Daerah"*, Perspektif, Volume XVIII Nomor 2, Mei 2013.
- Rauf, Maswadi, 2006, *Partai Politik dalam Sistem Kepartaian Indonesia Antara Kenyataan dan Harapan*, Jurnal Politika, Vol.2
- Rusdiana, Erma, 2016, *Pertanggungjawaban pidana Partai Politik sebagai badan hukum dalam mewujudkan penegakan hukum korupsi politik*, Tesis, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.
- Santo, Paulus Aluk Fajar Dwi, *"Tinjauan tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana"*, Humaniora, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2012.
- Sanyoto, *"Penegakan Hukum"*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8 Nomor 3, September 2008.
- Sarwanto, Eddy, 1986, *Dasar Hukum dan Kedudukan Maklumat Wakil Presiden No. X/1945 dan Maklumat Pemerintah 14 Nopember Th. 1945*, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Pajajaran.
- Suhariyanto, Budi, *Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara*, Rechtsvinding, Volume 7, Nomor 1, April 2018.
- Wahyu, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Wangga, Maria Silvy E., *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Integritas, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018.

E. Internet

- Andi Irawan, *Rent Seeking Para Pejabat Publik*, <https://antikorupsi.org/id/article/rent-seeking-para-pejabat-publik>, diakses tanggal 29 Juni 2021.

- Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera*, <https://pks.id/resources/documents/AD-ART%20PKS.pdf>, diakses tanggal 29 Juni 2021.
- Dewas: Revisi UU KPK Bertujuan Melemahkan*, <https://nasional.republika.co.id/berita/q4kau8328/dewas-revisi-uu-kpk-bertujuan-melemahkan>, diakses tanggal 30 Juni 2021.
- “Deretan Nama Pejabat di Dakwaan Korupsi E-KTP”*, <https://www.liputan6.com/news/read/2880943/deretan-nama-pejabat-di-dakwaan-korupsi-e-ktp>, diakses tanggal 27 Juni 2021.
- DPR Dinilai Sengaja Pilih Firli Sebagai Ketua KPK*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/11030821/dpr-dinilai-sengaja-pilih-firli-sebagai-ketua-kpk>, diakses tanggal 30 Juni 2021.
- DPR 'paling korup' menurut persepsi masyarakat Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39189729>, diakses tanggal 23 Juni 2020.
- Drijfmest-arrest (2003): Pertanggungjawaban Korporasi di Belanda*, <https://nasima.wordpress.com/2017/03/07/drijfmest-arrest-2003-pertanggungjawaban-korporasi-di-belanda/>, diakses tanggal 2 Juli 2021.
- Dugaan Firli Bahuri Main Kasus di KPK, OTT Bocor, & Gratifikasi*, <https://tirto.id/dugaan-firli-bahuri-main-kasus-di-kpk-ott-bocor-gratifikasi-gg3K>, diakses tanggal 1 Juli 2021.
- Graph TPK Berdasarkan Profesi/ Jabatan*, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>, diakses tanggal 1 November 2020.
- Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/12/21571151/janji-9-parpol-tak-calonkan-eks-koruptor-di-pilkada-2020?page=all>, diakses tanggal 7 Juli 2020.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021*, https://jdih.kpu.go.id/data/data_parpol/AD%20ART%20PPP%202019.pdf, diakses tanggal 29 Juni 2021.
- Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016 Nomor: VI/MUNASLUB/GOLKAR/2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar*, [https://infopemilu.kpu.go.id/download/verpol/131/ADART%20PARTAI%20GOLKAR\(1\).pdf](https://infopemilu.kpu.go.id/download/verpol/131/ADART%20PARTAI%20GOLKAR(1).pdf), diakses tanggal 29 Juni 2021.
- Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan No: 07/TAP/MUKTAMAR VIII/PPP/2016 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan*, https://www.ukmriau.com/wp-content/uploads/2017/10/AD_ART-PPP.pdf, diakses tanggal 29 Juni 2021.

- Mengapa Kepala Daerah Gemar • Korupsi? Ini Kajian KPK*, <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt5b66f6b800ebe/mengapa-kepala-daerah-gemar-korupsi-ini-kajian-kpk?page=all>, diakses tanggal 26 Februari 2021.
- Pakar: Benang Merah Suap Impor Daging Terputus*, <https://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/06/pakar-benang-merah-kasus-suap-impor-daging-terputus>, diakses tanggal 27 Oktober 2020.
- “Politikus Golkar: Dana Parpol Minim Salah Satu Penyebab Korupsi”*, <https://nasional.tempo.co/read/1046140/politikus-golkar-dana-parpol-minim-salah-satu-penyebab-korupsi>, diakses tanggal 28 Juni 2021.
- Pukat: Seluruh Parpol Terlibat Korupsi*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat--seluruh-parpol-terlibat-kasus-korupsi/>, diakses tanggal 9 Juni 2020.
- Supandji, Hendarman, *Model Penegakan Hukum di Daerah, Persoalan dan Implementasinya*, http://kalbar.go.id/_appsi07/berkas/06%20MAKALAH%20JAKSA%20AGUNG.pdf, diakses tanggal 21 Januari 2020.
- 8-9-1974: Pengampunan Tanpa Syarat Presiden AS Gerald Ford pada Richard Nixon, <https://www.liputan6.com/global/read/4350126/8-9-1974-pengampunan-tanpa-syarat-presiden-as-gerald-ford-pada-richard-nixon>, diakses tanggal 27 Desember 2020.